

JMCB: Jurnal Mitra Cendekia Berkarya

<https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jmcb>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Sail to Campus: Penguatan Pengelolaan Wisata Pesisir Berkelanjutan Berbasis Kolaborasi



Khusnul Khotiah^{*1}, Zakaria², Sjamsier Husen³, Yendra⁴, Fahrudin Pasolo⁵,
Fadriansyah Fachril⁶

^{1,2,3,5} Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

^{4,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

Corresponding author.

E-mail address: hussul.khotimah1978@gmail.com

Author(s) Statement

Penulis (penulis) menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Pengelolaan wisata pesisir berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan wisata berkelanjutan melalui integrasi perspektif tata kelola destinasi, ekowisata, dan kualitas pelayanan dalam konteks Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, Jayapura. Kegiatan dilaksanakan melalui program *Sail to Campus* dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan diseminasi pengetahuan yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta organisasi lingkungan. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi dan diskusi mengenai pengelolaan destinasi, ekowisata, *service excellence*, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tata kelola kolaboratif, pemasaran digital, serta keberlanjutan usaha pariwisata. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya forum edukasi lintas pemangku kepentingan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi lokal, sosial budaya, tata kelola, pelayanan, dan digitalisasi sebagai kerangka untuk memperkuat pengelolaan wisata pesisir. Implikasi kegiatan menegaskan perlunya tindak lanjut berupa asesmen destinasi, penguatan kapasitas masyarakat dan UMKM, penyusunan rencana aksi bersama, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung pengelolaan destinasi yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

Kata kunci: ekowisata; pemberdayaan masyarakat; wisata berkelanjutan; wisata pesisir; Jayapura.

Pendahuluan

1.1 Pariwisata Pesisir dan Tantangan Keberlanjutan

Pariwisata pesisir memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena menghubungkan potensi sumber daya alam, aktivitas ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan pengalaman wisatawan dalam satu kawasan. Keindahan pantai dan lingkungan pesisir dapat menjadi daya tarik yang mendorong kunjungan sekaligus membuka peluang ekonomi melalui usaha kuliner,

transportasi, perdagangan, jasa wisata, serta berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Namun, peningkatan aktivitas pariwisata perlu dikelola dengan hati-hati karena kawasan pesisir merupakan ruang ekologis sekaligus ruang hidup masyarakat. Pengembangan destinasi yang hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan berpotensi mengabaikan kapasitas lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, keberlanjutan budaya, serta kualitas tata kelola destinasi.

Konsep pariwisata berkelanjutan memberikan kerangka untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengembangan destinasi. UNEP dan UNWTO (2005) menekankan bahwa prinsip keberlanjutan perlu diterapkan pada seluruh bentuk pariwisata dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masa kini maupun masa mendatang, serta kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Prinsip tersebut diperkuat melalui *Global Sustainable Tourism Council Destination Criteria* yang mengelompokkan pengelolaan destinasi berkelanjutan ke dalam 4 ranah utama, yaitu tata kelola keberlanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan (GSTC, 2019). Kerangka tersebut telah menjadi landasan konseptual dalam draf awal kegiatan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi pariwisata berkelanjutan semakin menekankan keterkaitan antara *green tourism*, *community-based tourism*, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Risfandini (2024) mengemukakan bahwa ketiga pendekatan tersebut merupakan elemen penting dalam memperkuat implementasi pariwisata berkelanjutan karena pembangunan destinasi perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekaligus kemampuan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata. Poltekpar NHI Journal Pada kawasan pesisir, kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan karena kualitas destinasi sangat bergantung pada kemampuan menjaga sumber daya alam sekaligus membangun tata kelola yang memberikan ruang bagi masyarakat.

Kawasan pesisir dengan demikian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas wisata, melainkan sebagai sistem sosial-ekologis yang membutuhkan keseimbangan antara konservasi, aktivitas ekonomi, kepentingan masyarakat, dan pelayanan bagi pengunjung. Perspektif ini menjadi dasar dalam membahas pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp melalui kegiatan edukasi *Sail to Campus*, tanpa mengasumsikan adanya kondisi kerusakan tertentu yang belum dibuktikan melalui asesmen lapangan.

1.2 Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Keberlanjutan destinasi membutuhkan keterlibatan masyarakat karena penduduk lokal merupakan pihak yang tinggal, beraktivitas, dan berinteraksi secara langsung dengan sumber daya pariwisata. Pendekatan *community-based tourism* (CBT) menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki ruang dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya diukur berdasarkan jumlah wisatawan, tetapi juga berdasarkan kemampuan pariwisata untuk memberikan manfaat yang lebih merata sekaligus menjaga lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Penelitian Hariyadi et al. (2024) menunjukkan bahwa *community-based tourism* berperan dalam mendukung keberlanjutan destinasi melalui keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal. Pendekatan tersebut menghubungkan tujuan peningkatan kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial budaya. Hanafi (2024) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa implementasi CBT mencakup perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, partisipasi masyarakat, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi warga.

Keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting dalam pengelolaan destinasi pesisir karena aktivitas wisata berinteraksi langsung dengan sumber daya yang digunakan oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kepentingan, mengembangkan usaha, mempertahankan nilai-nilai lokal, serta terlibat dalam menjaga kualitas destinasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada keterlibatan dalam aktivitas wisata, tetapi mencakup proses pengambilan keputusan, pembagian manfaat, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi pengelolaan destinasi.

Relevansi pendekatan tersebut telah ditemukan dalam konteks Papua. Sriwijaya et al. (2024), melalui kajian pengembangan ekowisata bahari di Pulau Liki, Papua, menempatkan CBT sebagai strategi yang menghubungkan potensi wisata dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat setempat. Jurnal Universitas Gadjah Mada: Temuan tersebut memberikan konteks regional bahwa pengembangan pariwisata di Papua memerlukan keterlibatan masyarakat dan tidak cukup hanya mengandalkan potensi keindahan alam.

1.3 Dimensi Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan

Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan membutuhkan pendekatan multidimensional karena keberhasilan suatu destinasi ditentukan oleh hubungan antara kualitas lingkungan, manfaat ekonomi, kehidupan sosial budaya, tata kelola, dan pelayanan. Dalam konteks kegiatan *Sail to Campus*, dimensi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam keberlanjutan lingkungan, ekonomi lokal, sosial budaya, tata kelola, dan kualitas pelayanan. Pengelompokan ini mengembangkan kerangka awal artikel yang sebelumnya menggunakan aspek lingkungan, ekonomi lokal, sosial budaya, serta tata kelola dan layanan.

Dimensi lingkungan menempatkan kelestarian sumber daya pesisir sebagai fondasi keberlanjutan destinasi. Pengelolaan kebersihan, sampah, fasilitas, sanitasi, dan pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas wisata. Dimensi ekonomi lokal berkaitan dengan sejauh mana keberadaan destinasi mampu membuka ruang bagi usaha dan layanan yang dikelola masyarakat sehingga manfaat ekonomi tidak terlepas dari komunitas sekitar. Sementara itu, dimensi sosial budaya menekankan penghormatan terhadap nilai, identitas, pengetahuan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pengembangan destinasi.

Dimensi tata kelola berkaitan dengan kejelasan peran, koordinasi, pengambilan keputusan, serta kolaborasi antaraktor. Kajian mengenai tata kelola pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya memerlukan mekanisme kelembagaan yang mampu mengelola kepentingan para pemangku kepentingan. Pada destinasi berbasis komunitas, tata kelola yang baik memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat sekaligus membangun hubungan kerja antara pemerintah, pengelola, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Dimensi pelayanan melengkapi keempat aspek tersebut karena keberlanjutan destinasi berkaitan dengan kualitas pengalaman pengunjung. Informasi yang jelas, keramahan, keamanan, kebersihan, kemudahan memperoleh layanan, serta mekanisme penanganan keluhan merupakan bagian dari kualitas pengelolaan destinasi. Dengan demikian, pelayanan tidak ditempatkan terpisah dari keberlanjutan, melainkan menjadi bagian dari proses menjaga hubungan antara destinasi, pengunjung, dan masyarakat lokal.

1.4 Konteks Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp Jayapura

Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp menjadi fokus kegiatan edukasi *Sail to Campus* bertema "Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp Jayapura". Berdasarkan poster kegiatan, forum ini mempertemukan perspektif pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam. Materi yang dijadwalkan mencakup pengelolaan kedua destinasi, ekowisata berkelanjutan, serta *service excellence* dalam pengelolaan ekowisata. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan destinasi diposisikan sebagai persoalan multidimensional yang membutuhkan perspektif kelembagaan, lingkungan, dan pelayanan.

Konteks geografis Jayapura memberikan relevansi yang kuat bagi pembahasan pengelolaan wisata pesisir berbasis masyarakat. Penelitian Kadir et al. (2025) di kawasan Teluk Youtefa, Jayapura, menunjukkan potensi ekowisata yang mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat, keindahan alam, aset budaya, dan ekonomi kreatif. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengelolaan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. *Walisongo Journal*: Temuan tersebut tidak digunakan untuk menggambarkan kondisi Pantai Hamadi atau Holtekamp pada saat kegiatan berlangsung, tetapi memberikan konteks lokal yang relevan mengenai pentingnya kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Jayapura.

Pengelolaan kawasan pesisir Jayapura perlu ditempatkan dalam hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Kajian terbaru mengenai Teluk Youtefa menunjukkan bahwa persoalan lingkungan pesisir memiliki dimensi ekologis, sosial ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Hal ini memperkuat pentingnya perspektif multidimensional dalam edukasi wisata berkelanjutan. Namun, karena kegiatan *Sail to Campus* tidak dilengkapi dengan survei lapangan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, artikel ini tidak menggunakan kondisi kawasan Teluk Youtefa atau lokasi lain sebagai bukti empiris mengenai kondisi kedua pantai tersebut.

Dengan demikian, Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp dalam artikel ini ditempatkan sebagai konteks penerapan gagasan pengelolaan wisata berkelanjutan, sedangkan penilaian mengenai kondisi lingkungan, ekonomi, sosial budaya, fasilitas, dan kualitas pelayanan pada masing-masing destinasi membutuhkan asesmen lapangan tersendiri. Pembatasan tersebut penting agar pembahasan tetap memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Permasalahan dan Kebutuhan Mitra

Kegiatan *Sail to Campus* menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam membahas pengelolaan wisata pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan agenda yang terdokumentasi, tiga isu utama yang menjadi fokus kegiatan adalah pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, pengembangan ekowisata berkelanjutan, serta kualitas pelayanan (*service excellence*). Tiga materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari unsur pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan kalangan akademisi.

Berdasarkan substansi tersebut, kebutuhan kegiatan dapat dirumuskan dalam tiga ranah. Pertama, kebutuhan untuk membangun pemahaman mengenai tata kelola destinasi yang mampu menghubungkan peran pemerintah, pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, kebutuhan untuk memperkuat perspektif ekowisata berkelanjutan agar pemanfaatan potensi pesisir tetap mempertimbangkan perlindungan lingkungan, manfaat ekonomi lokal, serta nilai-nilai sosial budaya. Ketiga, kebutuhan untuk memperkuat orientasi pelayanan agar pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman yang aman, nyaman, informatif, dan responsif bagi pengunjung.

Ketiga kebutuhan tersebut saling melengkapi. Tata kelola menyediakan kerangka kelembagaan, ekowisata memberikan orientasi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat, sedangkan kualitas pelayanan menghubungkan pengelolaan destinasi dengan pengalaman pengunjung. Penelitian mengenai implementasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa green tourism, CBT, dan pemberdayaan lokal perlu dikembangkan secara terintegrasi untuk memperkuat praktik keberlanjutan destinasi (Risfandini, 2024). Poltekpar NHI Journal Kajian lain di kawasan pesisir Indonesia menunjukkan bahwa penguatan CBT membutuhkan kemitraan antara sektor publik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan dalam praktik pengelolaan.

Kegiatan edukasi melalui *Sail to Campus*, dengan demikian, relevan sebagai ruang pertukaran pengetahuan yang menghubungkan perspektif akademik, kebijakan, dan pengelolaan lingkungan. Kebutuhan mitra dalam artikel ini tidak diposisikan sebagai hasil *need assessment* formal karena dokumen yang tersedia tidak memuat survei kebutuhan. Rumusan tersebut diturunkan dari tema, susunan materi, dan komposisi narasumber yang tercantum dalam dokumentasi kegiatan. Pendekatan ini memastikan pengembangan artikel tetap konsisten dengan bukti yang tersedia.

1.6 Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program *Sail to Campus* bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan wisata berkelanjutan melalui integrasi perspektif tata kelola destinasi, ekowisata, dan kualitas pelayanan dalam konteks Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, Jayapura. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa keberlanjutan destinasi pesisir membutuhkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, manfaat ekonomi lokal, kepentingan sosial budaya, keterlibatan masyarakat, serta kualitas pelayanan bagi pengunjung.

Secara lebih spesifik, kegiatan ini diarahkan untuk mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, dan organisasi lingkungan dalam forum edukasi mengenai pengelolaan destinasi; memperkuat pemahaman tentang prinsip ekowisata dan keterlibatan masyarakat; serta menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Agenda kegiatan yang terdokumentasi memang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut melalui materi pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, ekowisata berkelanjutan, serta *service excellence*.

Dalam jangka yang lebih luas, kegiatan ini diharapkan menjadi landasan edukatif bagi pengembangan pengelolaan destinasi pesisir yang kolaboratif dan berbasis masyarakat. Kontribusi kegiatan tidak dimaknai sebagai bukti terjadinya perubahan kondisi kedua destinasi, melainkan sebagai upaya membangun pemahaman bersama yang dapat ditindaklanjuti melalui asesmen lapangan, penyusunan rencana aksi, pelibatan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Dengan orientasi tersebut, kegiatan *Sail to Campus* tidak berhenti pada penyampaian gagasan, tetapi juga memberikan kerangka awal untuk menghubungkan edukasi, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan destinasi.

METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu, Tempat, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui program *Sail to Campus* dengan tema “Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp Jayapura.” Berdasarkan poster kegiatan, program dijadwalkan pada Kamis, 14 November 2024, pukul 10.00–12.00 WIT, dengan Universitas Yapis Papua sebagai lokasi kegiatan. Diseminasi kegiatan dirancang melalui platform Zoom dan YouTube EcoNusa TV, sehingga materi dapat menjangkau audiens secara daring.



Gambar 2.1. Kegiatan *Sail to Campus* Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp Jayapura

Sumber: Dokumentasi kegiatan *Sail to Campus*, Universitas Yapis Papua, 2024.

Poster pada Gambar 2.1 memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan *Sail to Campus* bertema “Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Pantai Hamadi & Pantai Holtekamp Jayapura” yang dilaksanakan pada Kamis, 14 November 2024. Kegiatan melibatkan unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan dengan materi yang mengintegrasikan pengelolaan destinasi, ekowisata berkelanjutan, serta kualitas pelayanan. Dokumentasi tersebut sekaligus menunjukkan pendekatan kolaboratif yang digunakan dalam membangun ruang edukasi tentang pengelolaan wisata pesisir yang berkelanjutan.

Kegiatan ini mempertemukan unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam. Narasumber dari Universitas Yapis Papua terdiri atas Dr. Khusnul Khotimah, S.E., M.M., Dr. Sjamsier Husen, S.E., M.Si., Dr. Drs. Fahrudin Pasolo, M.Si., dan Dr. Yendra, S.E., M.M. Materi yang disampaikan mencakup service excellence dalam pengelolaan ekowisata serta beberapa aspek pendukung pengembangan destinasi, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM lokal, tata kelola kolaboratif destinasi wisata, pemasaran digital dan penguatan citra destinasi, serta pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha pariwisata. Pengembangan materi tersebut diarahkan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wisata pesisir yang mengintegrasikan kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi digital, serta keberlanjutan pengelolaan destinasi.

Dalam pengelolaan ekowisata, Matias Benoni Mano, S.Par., M.Kp., Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, menyampaikan materi tentang pengelolaan wisata Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, sedangkan Aloysius Numberi dari Yayasan EcoNusa menyampaikan materi tentang ekowisata berkelanjutan. Kegiatan dimoderatori oleh Dr. H. Zakaria, S.E., M.Si. Informasi jabatan dan afiliasi tersebut merujuk pada poster yang digunakan dalam kegiatan tahun 2024. Keterlibatan unsur akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan memberikan karakter kolaboratif pada forum edukasi. Masing-masing pihak membawa perspektif yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu tata kelola destinasi, prinsip keberlanjutan lingkungan, dan kualitas pelayanan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi lintas pemangku kepentingan tersebut menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan pengelolaan destinasi serta isu keberlanjutan yang berkembang di masyarakat.

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan diarahkan pada pemangku kepentingan dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan pariwisata, ekowisata, serta keberlanjutan kawasan pesisir. Kegiatan edukasi dirancang untuk memberikan ruang pembelajaran mengenai keterkaitan antara pengelolaan destinasi, perlindungan lingkungan, manfaat ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan cakupan tersebut, forum *Sail to Campus* ditempatkan sebagai media diseminasi pengetahuan yang dapat mempertemukan kepentingan akademik, kelembagaan, dan masyarakat dalam pembahasan wisata berkelanjutan.

Dokumentasi yang tersedia belum memuat daftar hadir dan karakteristik peserta, sehingga jumlah, komposisi, serta latar belakang peserta tidak dinyatakan secara kuantitatif dalam artikel ini. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga ketepatan pelaporan kegiatan. Fokus analisis diarahkan pada substansi materi, bentuk forum yang terdokumentasi, dan relevansi pembahasan terhadap pengelolaan wisata berkelanjutan, bukan pada karakteristik peserta yang belum dapat diverifikasi. Keterbatasan data peserta memang telah dicatat dalam dokumen awal kegiatan.

2.3 Pendekatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan diseminasi pengetahuan. Pendekatan edukatif diwujudkan melalui penyampaian materi yang menghubungkan konsep pengelolaan destinasi dengan ekowisata berkelanjutan serta kualitas pelayanan. Materi diarahkan untuk memberikan kerangka pemahaman bahwa keberlanjutan destinasi pesisir tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam, tetapi juga memerlukan pengelolaan lingkungan, keterlibatan masyarakat, manfaat ekonomi lokal, tata kelola, serta pelayanan kepada pengunjung.

Pendekatan kolaboratif tercermin dari keterlibatan narasumber yang mewakili tiga unsur berbeda, yaitu pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi lingkungan. Pertemuan ketiga perspektif tersebut memungkinkan isu wisata berkelanjutan dibahas dari sudut pandang pengelolaan destinasi, pelestarian sumber daya, serta mutu pelayanan. Komposisi ini relevan dengan pendekatan pengelolaan destinasi berkelanjutan yang menempatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola pariwisata.

Pendekatan diseminasi pengetahuan dilakukan melalui forum *Sail to Campus* yang menggabungkan kegiatan panel dengan rencana penyebaran materi melalui media daring. Poster mencantumkan *Zoom* dan *YouTube EcoNusa TV* sebagai saluran kegiatan, sedangkan dokumentasi foto memperlihatkan forum panel dengan mikrofon dan perangkat presentasi. Pendekatan tersebut memperluas fungsi kegiatan dari penyampaian materi di ruang pertemuan menjadi media edukasi publik. Namun, karena dokumentasi yang tersedia tidak mencatat jumlah penonton daring, artikel ini tidak menyatakan tingkat jangkauan atau efektivitas diseminasi digital secara kuantitatif.

2.4 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan kegiatan disusun dengan menghubungkan informasi yang terdokumentasi dengan kerangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara faktual, arsip mendukung penetapan tema dan agenda, penjadwalan tiga materi, rencana diseminasi daring, serta forum panel yang terdokumentasi. Sementara itu, tahapan evaluasi reflektif dan tindak lanjut ditempatkan sebagai kerangka pengembangan kegiatan karena dokumentasi yang tersedia belum menunjukkan bahwa kedua tahapan tersebut telah dilaksanakan secara terukur.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Wisata Berkelanjutan

Tahap	Uraian Kegiatan	Arah/Capaian
Persiapan	Penetapan tema, narasumber, agenda, waktu, media, serta kebutuhan pelaksanaan <i>Sail to Campus</i> .	Membangun kesiapan forum edukasi wisata berkelanjutan.
Identifikasi Fokus Materi	Penetapan isu pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, ekowisata berkelanjutan, serta <i>service excellence</i> .	Mengintegrasikan aspek pengelolaan destinasi, lingkungan, dan pelayanan.
Penyusunan Materi	Penyiapan materi sesuai dengan bidang dan perspektif masing-masing narasumber.	Membentuk kerangka edukasi yang multidimensional.
Pelaksanaan <i>Sail to Campus</i>	Penyampaian materi melalui forum panel dengan dukungan media presentasi serta rencana diseminasi secara daring.	Menyediakan ruang edukasi dan pertukaran pengetahuan.
Integrasi Pembahasan	Menghubungkan tata kelola destinasi, ekowisata, partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan.	Membentuk pemahaman yang komprehensif tentang pariwisata berkelanjutan.
Evaluasi Reflektif	Menelaah substansi dan relevansi materi terhadap kebutuhan dalam pengelolaan destinasi.	Mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut.
Rencana Tindak Lanjut	Merumuskan arah asesmen destinasi, kolaborasi, rencana aksi, dan pemantauan.	Mendorong keberlanjutan program setelah forum edukasi.

Sumber: Diolah oleh tim pengabdian berdasarkan dokumentasi kegiatan dan kerangka pengembangan program, 2025.

Tahapan evaluasi reflektif dan tindak lanjut merupakan kerangka pengembangan/rekomendasi, bukan hasil pelaksanaan tahun 2024 yang telah terverifikasi. Rangkaian pada Tabel 1 menempatkan kegiatan edukasi sebagai titik awal dalam pengembangan pemahaman tentang wisata berkelanjutan. Tahap persiapan dan identifikasi fokus materi memberikan landasan bagi penyusunan substansi kegiatan, sedangkan pelaksanaan forum menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif tata kelola, ekowisata, dan pelayanan. Integrasi ketiga perspektif tersebut selanjutnya menjadi dasar konseptual untuk menyusun evaluasi reflektif serta rencana tindak lanjut. Dengan pola ini, kegiatan pengabdian tidak diposisikan sebagai intervensi yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi destinasi, melainkan sebagai proses edukasi yang dapat menjadi landasan bagi asesmen, kolaborasi, dan pengembangan aksi pengelolaan pada tahap berikutnya.

2.5 Materi Kegiatan

Materi kegiatan disusun berdasarkan tiga perspektif yang saling melengkapi. Materi pertama membahas pengelolaan wisata Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, yang menempatkan tata kelola destinasi sebagai bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Materi kedua membahas ekowisata berkelanjutan, dengan orientasi pada hubungan antara pemanfaatan potensi wisata, perlindungan sumber daya alam, dan keterlibatan masyarakat. Materi ketiga membahas *service excellence* dalam pengelolaan ekowisata, yang menghubungkan keberlanjutan destinasi dengan kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung. Ketiga topik tersebut tercantum secara eksplisit dalam poster kegiatan.

Ketiga materi tersebut kemudian ditempatkan dalam satu kerangka pengelolaan wisata berkelanjutan. Perspektif tata kelola memberikan dasar mengenai pengaturan dan koordinasi pengelolaan destinasi; perspektif ekowisata menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya; sedangkan *service excellence* memperkuat orientasi pada kualitas interaksi dan pelayanan kepada pengunjung. Integrasi materi tersebut memungkinkan pembahasan wisata pesisir bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada objek wisata menuju pendekatan yang mempertimbangkan lingkungan, masyarakat, kelembagaan, manfaat ekonomi, dan pengalaman pengunjung secara terpadu.

Dalam artikel ini, uraian materi dibatasi pada tema yang dapat diverifikasi melalui poster kegiatan. Dokumen yang tersedia tidak memuat bahan presentasi lengkap maupun transkrip pemaparan narasumber. Pengembangan konseptual pada bagian Hasil dan Pembahasan nantinya akan dibedakan secara jelas antara substansi yang terdokumentasi dalam kegiatan dan interpretasi akademik yang diperkuat melalui literatur.

2.6 Teknik Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif dengan menelaah kesesuaian antara tujuan, materi, proses pelaksanaan yang terdokumentasi, serta arah tindak lanjut. Sumber evaluasi berasal dari poster kegiatan dan dokumentasi foto panel. Poster digunakan untuk mengidentifikasi tema, waktu, platform, narasumber, serta materi yang direncanakan, sedangkan foto digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kegiatan yang dapat diamati secara visual. Metode tersebut sesuai dengan karakter data yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas intervensi.

Evaluasi disusun berdasarkan 4 komponen, yaitu input, proses, output, dan tindak lanjut. Input mencakup keterlibatan narasumber lintas sektor serta tiga tema utama kegiatan. Proses mencakup penyampaian materi dan forum panel yang telah didokumentasikan. Output yang dapat diverifikasi terbatas pada terselenggaranya forum edukasi dan adanya dokumentasi kegiatan. Sementara itu, komponen tindak lanjut diarahkan pada rekomendasi berupa asesmen kondisi destinasi, penguatan koordinasi pemangku kepentingan, penyusunan rencana aksi, serta pemantauan terhadap kegiatan berikutnya.

Evaluasi tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test* karena instrumen tersebut tidak tersedia dalam dokumentasi kegiatan. Daftar peserta, transkrip diskusi, rekaman lengkap, hasil survei lapangan, dan instrumen pengukuran perubahan kondisi destinasi juga tidak tersedia. Dengan demikian, artikel ini tidak mengklaim adanya peningkatan pengetahuan peserta, perubahan perilaku, peningkatan kualitas pelayanan, ataupun perbaikan kondisi Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp sebagai dampak langsung dari kegiatan.

Pembatasan tersebut sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat desain evaluasi pada kegiatan pengabdian berikutnya. Evaluasi dapat dikembangkan melalui kuesioner singkat sebelum dan sesudah kegiatan, dokumentasi karakteristik peserta, pencatatan pertanyaan dan respons selama forum, asesmen lapangan, serta pemantauan rencana aksi setelah kegiatan. Draf awal sendiri telah mengusulkan penggunaan 3 sampai 5 pertanyaan sebelum dan sesudah forum, serta pemeriksaan tindak lanjut 1 atau 2 bulan setelah kegiatan. Dengan mekanisme tersebut, kegiatan berikutnya dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat untuk menilai perubahan pemahaman, implementasi tindak lanjut, serta kontribusi program terhadap pengelolaan destinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Wisata Berkelanjutan melalui Sail to Campus

Kegiatan Sail to Campus menjadi ruang edukasi yang mempertemukan perspektif akademisi, pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan pemangku kepentingan untuk membahas pengelolaan wisata berkelanjutan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, Jayapura. Kegiatan ini dirancang untuk menghubungkan konsep keberlanjutan dengan persoalan pengelolaan destinasi melalui penyampaian materi yang mencakup tata kelola, ekowisata, kualitas pelayanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan, pemasaran digital, serta keberlanjutan usaha pariwisata. Cakupan tersebut menempatkan pengelolaan destinasi sebagai proses multidimensional yang membutuhkan keterhubungan antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan melalui forum edukasi memberi kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan perspektif sesuai bidang masing-masing. Materi *service excellence* menekankan pentingnya kualitas interaksi dan pelayanan dalam membentuk pengalaman pengunjung. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan pada penguatan keterlibatan masyarakat dan UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata. Tata kelola kolaboratif menempatkan koordinasi antaraktor sebagai dasar pengelolaan destinasi, sedangkan pemasaran digital memberikan perspektif mengenai pemanfaatan teknologi untuk memperluas informasi dan membangun citra destinasi. Pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha melengkapi pembahasan dengan menempatkan aspek ekonomi sebagai bagian dari kemampuan destinasi untuk mempertahankan aktivitas pariwisata secara berkelanjutan.

Integrasi berbagai materi tersebut memperluas orientasi kegiatan dari sekadar penyampaian informasi mengenai objek wisata menjadi proses edukasi tentang bagaimana destinasi dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan ini relevan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menempatkan pengelolaan lingkungan, manfaat sosial ekonomi, perlindungan budaya, dan tata kelola sebagai komponen yang saling berkaitan (GSTC, 2019). Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, forum edukasi menjadi tahap awal untuk membangun kesamaan perspektif sebelum diarahkan pada asesmen destinasi, penyusunan rencana aksi, serta pendampingan pada kegiatan berikutnya.

3.2 Penguatan Pemahaman tentang Pengelolaan Destinasi Berkelanjutan

Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan membutuhkan cara pandang yang melampaui orientasi pada peningkatan jumlah kunjungan. Destinasi perlu dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat, perlindungan nilai-nilai sosial budaya, tata kelola kelembagaan, serta kualitas pengalaman pengunjung. Materi dalam kegiatan *Sail to Campus* memberikan kerangka edukatif untuk menghubungkan berbagai dimensi tersebut dalam konteks pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp.

Dimensi lingkungan berkaitan dengan kemampuan destinasi dalam mempertahankan kualitas sumber daya alam sebagai modal utama aktivitas wisata. Pengelolaan kebersihan, sampah, sanitasi, fasilitas, dan penggunaan ruang merupakan beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam agenda keberlanjutan. Namun, aspek tersebut dalam artikel ini tidak dinyatakan sebagai masalah yang telah ditemukan di kedua pantai karena kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan asesmen terhadap kondisi fisik destinasi. Dokumen awal juga menegaskan bahwa tidak tersedia observasi lapangan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi tertentu di Pantai Hamadi maupun Pantai Holtekamp.

Dimensi ekonomi menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari rantai manfaat pariwisata. Keberadaan destinasi dapat membuka ruang bagi usaha kuliner, kerajinan, transportasi, pemandu wisata, serta jasa pendukung lainnya. Pengelolaan yang berkelanjutan perlu mendorong agar manfaat ekonomi tidak terpisah dari masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi. Risfandini (2024) menekankan pentingnya keterkaitan antara *community-based tourism*, *green tourism*, dan pemberdayaan lokal dalam implementasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Artikel Risfandini (2024)

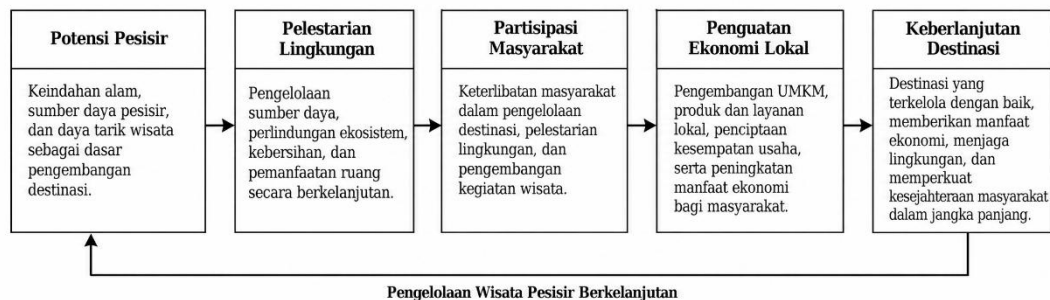
Pada dimensi sosial dan kelembagaan, keberlanjutan membutuhkan partisipasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Masyarakat perlu memperoleh ruang dalam pengembangan destinasi, sedangkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan pelaku usaha dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan destinasi berkelanjutan dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan lingkungan yang terjaga, manfaat ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, tata kelola kolaboratif, dan kualitas pelayanan.

3.3 Ekowisata sebagai Pendekatan Pelestarian dan Pemberdayaan Masyarakat

Ekowisata memberikan kerangka yang relevan dalam pengelolaan kawasan pesisir karena menghubungkan aktivitas wisata dengan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dalam kegiatan *Sail to Campus*, materi ekowisata berkelanjutan ditempatkan sebagai salah satu perspektif utama dalam pembahasan pengelolaan Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp. Pada dokumen awal, tema ekowisata memang menjadi salah satu dari tiga pokok materi utama yang direncanakan untuk forum.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai bagian dari proses pengelolaan, bukan sekadar penerima manfaat. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan layanan wisata, pengembangan produk lokal, pemeliharaan lingkungan, serta penyampaian pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada pengunjung. Model tersebut membuka peluang agar aktivitas pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sumber daya.

Penelitian Sriwijaya et al. (2024) mengenai pengembangan ekowisata bahari di Pulau Liki, Papua, menunjukkan relevansi *community-based tourism* sebagai pendekatan yang menghubungkan potensi wisata dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat lokal. Studi Sriwijaya et al. (2024) mengenai *sustainable community-based ecotourism* turut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan integrasi dimensi keberlanjutan merupakan komponen penting dalam membangun ekowisata yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks kegiatan ini, hubungan tersebut dapat dirumuskan secara konseptual pada gambar berikut.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Pengelolaan Wisata Pesisir Berkelanjutan

Sumber: Dikembangkan oleh tim pengabdian berdasarkan sintesis literatur, Sriwijaya et al. (2024)

Gambar 1.1 menggambarkan kerangka konseptual pengelolaan wisata pesisir berkelanjutan yang menghubungkan potensi sumber daya pesisir dengan pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Potensi pesisir menjadi dasar pengembangan destinasi yang perlu dikelola dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Partisipasi tersebut membuka ruang bagi pengembangan UMKM, produk, dan layanan wisata lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Keterhubungan antardimensi tersebut membentuk suatu proses berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka ini sejalan dengan pendekatan *community-based tourism* yang menempatkan keterlibatan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan.

3.4 Penguatan Kualitas Pelayanan dalam Pengelolaan Destinasi

Kualitas pelayanan merupakan bagian penting dari keberlanjutan destinasi karena pengalaman pengunjung terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan fisik, pengelola, masyarakat, fasilitas, serta informasi yang tersedia. Materi *service excellence* dalam kegiatan *Sail to Campus* memberikan perspektif bahwa keberlanjutan tidak cukup dibangun melalui konservasi lingkungan, tetapi juga perlu disertai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, informatif, dan responsif.

Dalam pengelolaan destinasi, kualitas pelayanan dapat diterjemahkan melalui keramahan, kejelasan informasi, kebersihan fasilitas, keamanan, respons terhadap kebutuhan pengunjung, serta mekanisme penanganan keluhan. Aspek tersebut membentuk hubungan antara pengunjung dan destinasi. Pelayanan yang baik berpotensi membangun pengalaman positif, sedangkan konsistensi pelayanan membutuhkan standar kerja, pembagian tanggung jawab, serta sumber daya manusia yang memadai.

Pada destinasi berbasis masyarakat, konsep *service excellence* perlu diterapkan dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai-nilai lokal. Pelayanan tidak harus menghilangkan identitas masyarakat demi memenuhi ekspektasi wisatawan. Sebaliknya, keramahan lokal, pengetahuan masyarakat, produk lokal, serta interpretasi budaya dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat ditempatkan sebagai titik temu antara kepuasan pengunjung, identitas lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan keberlanjutan destinasi.

Namun, kegiatan ini tidak melakukan survei kepuasan pengunjung maupun pengukuran kualitas pelayanan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp. Karena itu, pembahasan *service excellence* diposisikan sebagai penguatan kapasitas konseptual dan arah pengelolaan, bukan sebagai bukti bahwa kualitas pelayanan di kedua destinasi telah meningkat.

3.5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM Lokal

Keberlanjutan pariwisata memiliki hubungan erat dengan kemampuan destinasi dalam menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan wisata dapat menciptakan peluang bagi usaha kuliner, kerajinan, transportasi, pemandu, penyewaan perlengkapan, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Dalam kerangka *community-based tourism*, manfaat tersebut perlu diarahkan agar masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai pariwisata.

Pemberdayaan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, kualitas produk, pelayanan, pemasaran, pencatatan keuangan, serta kemampuan membangun jejaring. Pengembangan UMKM lokal yang terhubung dengan destinasi dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi sekaligus memperkuat karakter lokal melalui produk, kuliner, kerajinan, dan layanan yang merepresentasikan identitas masyarakat.

Pengalaman pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Papua menunjukkan pentingnya menghubungkan potensi destinasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sriwijaya et al. (2024) menempatkan CBT sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata bahari. Artikel tentang CBT di Papua Dalam konteks Jayapura, kajian Kadir et al. (2025) mengenai Teluk Youtefa turut menyoroti hubungan antara ekowisata berbasis komunitas, aset budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kadir et al. (2025)

Implikasinya bagi Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp adalah perlunya pemetaan usaha masyarakat pada tahap tindak lanjut. Pemetaan tersebut dapat mengidentifikasi jenis usaha, kebutuhan penguatan kapasitas, keterhubungan dengan aktivitas wisata, serta peluang pengembangan produk lokal. Langkah tersebut merupakan rekomendasi pengembangan, bukan hasil pemetaan UMKM yang telah dilakukan dalam kegiatan ini.

3.6 Tata Kelola Kolaboratif dan Penguatan Kelembagaan Destinasi

Pengelolaan wisata pesisir melibatkan berbagai kepentingan sehingga tidak dapat dibebankan kepada satu aktor. Pemerintah memiliki fungsi kebijakan dan fasilitasi, masyarakat memiliki pengetahuan lokal serta keterhubungan langsung dengan kawasan, pelaku usaha menyediakan produk dan layanan, organisasi lingkungan dapat memperkuat perspektif konservasi, sedangkan

perguruan tinggi berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, pendampingan, dan pengembangan model pengelolaan. Kegiatan *Sail to Campus* mencerminkan pendekatan lintas pemangku kepentingan karena mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi lingkungan dalam satu forum. Pada dokumentasi awal, susunan tersebut memang dirancang untuk mempertemukan perspektif penataan destinasi, ekowisata, dan kualitas pelayanan. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan pola kolaborasi yang lebih operasional pada tahap berikutnya.

Secara konseptual, pola kolaborasi tersebut menempatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, pengelola destinasi, pelaku usaha, serta organisasi lingkungan sebagai unsur yang saling melengkapi. Pemerintah daerah berperan dalam kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan destinasi, sedangkan perguruan tinggi berkontribusi melalui edukasi, penelitian, dan pendampingan. Masyarakat dan pengelola menjadi aktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan berbasis kondisi serta nilai lokal, sementara pelaku usaha mendukung pengembangan produk dan layanan yang memberikan manfaat ekonomi. Organisasi lingkungan berkontribusi dalam memperkuat perhatian terhadap konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Keterhubungan peran tersebut membentuk ruang kolaborasi yang memungkinkan setiap pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Kolaborasi tersebut diarahkan pada pembagian peran, pertukaran informasi, penyusunan agenda bersama, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan. Kajian Kadir et al. (2025) dalam konteks Teluk Youtefa menekankan relevansi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Jayapura. Kajian ekowisata Teluk Youtefa.

3.7 Pemasaran Digital dan Penguatan Citra Destinasi

Perkembangan teknologi digital mengubah cara wisatawan memperoleh informasi, membandingkan destinasi, menentukan pilihan perjalanan, dan membagikan pengalaman. Karena itu, pengelolaan wisata berkelanjutan perlu diikuti oleh strategi komunikasi yang mampu menyampaikan informasi destinasi secara akurat sekaligus membangun citra yang sesuai dengan karakter lingkungan dan masyarakat setempat.

Pemasaran digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai daya tarik, akses, fasilitas, produk masyarakat, aturan kunjungan, agenda kegiatan, serta pesan pelestarian lingkungan. Media sosial dan platform digital dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen promosi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi media edukasi bagi pengunjung. Pesan mengenai pengurangan sampah, penghormatan terhadap nilai lokal, penggunaan fasilitas, dan dukungan terhadap produk masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam komunikasi destinasi.

Dalam konteks Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, strategi digital pada tahap berikutnya dapat diarahkan pada pengembangan identitas destinasi, pemetaan informasi yang dibutuhkan pengunjung, penyusunan konten, serta pelibatan masyarakat dan UMKM lokal. Namun, artikel ini tidak mengukur efektivitas pemasaran digital pada kedua destinasi tersebut. Pembahasan tersebut ditempatkan sebagai salah satu dimensi penguatan kapasitas dan sebagai arah tindak lanjut kegiatan.

3.8 Pengelolaan Keuangan dan Keberlanjutan Usaha Pariwisata

Keberlanjutan usaha pariwisata membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai. Pelaku usaha lokal perlu memahami pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, penentuan biaya, perencanaan kebutuhan modal, serta pengelolaan arus kas. Kemampuan tersebut membantu pelaku usaha mengetahui kondisi usaha dan membuat keputusan yang lebih rasional terkait pengembangan produk maupun layanan.

Dalam konteks destinasi berbasis masyarakat, literasi dan pengelolaan keuangan memiliki fungsi yang lebih luas karena keberlanjutan usaha lokal berkontribusi terhadap kemampuan masyarakat dalam mempertahankan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata. Pencatatan sederhana dapat menjadi dasar untuk mengetahui perkembangan usaha, sedangkan perencanaan keuangan membantu pelaku usaha menghadapi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan.

Materi ini melengkapi pembahasan mengenai wisata berkelanjutan dengan menempatkan destinasi sebagai ruang yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Pengembangan destinasi diharapkan mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan usaha, seperti penyediaan produk, kuliner, jasa, serta layanan pendukung pariwisata. Keberlanjutan manfaat ekonomi tersebut memerlukan kapasitas pengelolaan usaha yang memadai, terutama dalam perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung keberlangsungan usaha lokal sekaligus memperkuat manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat. Kegiatan ini belum mencakup pengumpulan data keuangan UMKM maupun pengukuran perubahan kinerja usaha setelah pelaksanaan program. Pengelolaan keuangan dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai salah satu aspek penguatan kapasitas masyarakat yang dapat dikembangkan melalui program pendampingan berikutnya, terutama bagi pelaku UMKM yang terhubung dengan aktivitas wisata di kawasan pesisir.

3.9 Penguatan Pengelolaan Wisata Pesisir Berkelanjutan

Berdasarkan integrasi materi kegiatan dan literatur, pengelolaan wisata pesisir berkelanjutan dapat dirumuskan dalam lima dimensi utama. Model ini tidak dimaksudkan sebagai hasil pengujian empiris, melainkan sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan pengabdian selanjutnya.

Tabel 2. Model Penguatan Pengelolaan Wisata Pesisir Berkelanjutan

Dimensi	Fokus Penguatan	Arah Keberlanjutan
Lingkungan	Kebersihan, pengelolaan sampah, fasilitas, dan pemanfaatan ruang	Menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya pesisir
Ekonomi Lokal	UMKM, produk lokal, layanan wisata, dan pengelolaan keuangan	Memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat
Sosial Budaya	Partisipasi masyarakat, nilai lokal, dan identitas komunitas	Memperkuat penerimaan sosial dan pelestarian budaya
Tata Kelola	Pembagian peran, koordinasi, jejaring, dan kolaborasi	Membangun pengelolaan destinasi yang terintegrasi
Pelayanan Digitalisasi	dan <i>Service excellence</i> , informasi, promosi, komunikasi digital, dan kanal respons	Memperkuat pengalaman pengunjung dan citra destinasi

Sumber: Dikembangkan oleh tim pengabdian berdasarkan sintesis materi kegiatan dan literatur, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi tidak dibentuk oleh satu komponen secara terpisah. Perlindungan lingkungan perlu berjalan bersama dengan penguatan ekonomi masyarakat, partisipasi sosial, tata kelola kolaboratif, serta pelayanan yang berkualitas. Digitalisasi berperan sebagai instrumen pendukung untuk memperluas informasi dan komunikasi, sedangkan penguatan kapasitas masyarakat menjadi penghubung antara potensi destinasi dan manfaat yang dihasilkan.

Secara konseptual, penguatan pengelolaan destinasi berkelanjutan diawali dengan proses edukasi yang membangun pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan rencana aksi sesuai dengan kebutuhan destinasi. Rencana yang telah disepakati selanjutnya dapat diterapkan melalui kegiatan pengelolaan yang melibatkan pihak terkait, kemudian diikuti dengan monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Rangkaian proses tersebut memberikan arah bagi penguatan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan *Sail to Campus* tidak berhenti sebagai forum edukasi, tetapi dapat dikembangkan menjadi program pendampingan yang memiliki tahapan, pembagian peran, serta indikator capaian yang lebih terukur.

3.10 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif-reflektif berdasarkan dokumentasi yang tersedia. Dari sisi input, kegiatan ini mempertemukan narasumber dan materi yang merepresentasikan berbagai dimensi pengelolaan wisata berkelanjutan. Kegiatan ini menggunakan forum edukasi dan panel sebagai media untuk menyampaikan informasi. Sementara itu, *output* yang dapat dinyatakan secara terverifikasi adalah tersedianya forum edukasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi belum dapat menjangkau aspek outcome karena instrumen *pre-test-post-test*, survei kepuasan peserta, asesmen kondisi destinasi, maupun monitoring pascakegiatan belum tersedia. Keterbatasan serupa telah dicatat dalam dokumentasi awal yang menyatakan bahwa perubahan pengetahuan dan kondisi destinasi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dokumentasi forum. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan lebih tepat dinyatakan pada tingkat terlaksananya proses edukasi dan terbentuknya kerangka pembahasan multidimensional, bukan pada peningkatan pengetahuan atau perubahan kondisi destinasi yang belum terukur. Pada kegiatan berikutnya, evaluasi dapat diperkuat melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, asesmen lapangan, rencana aksi peserta, dokumentasi implementasi, serta monitoring secara berkala.

3.11 Faktor Pendukung dan Keterbatasan Kegiatan

Faktor pendukung kegiatan terletak pada keberagaman perspektif narasumber dan relevansi tema yang dibahas. Keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan memungkinkan pengelolaan wisata berkelanjutan dipahami dari perspektif yang lebih luas. Pemanfaatan media digital sebagai sarana diseminasi turut membuka peluang untuk memperluas jangkauan edukasi. Keterbatasan utama berkaitan dengan dokumentasi evaluasi. Data mengenai jumlah dan karakteristik peserta, hasil diskusi, perubahan pemahaman, kondisi awal destinasi, serta tindak lanjut pascakegiatan belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut membatasi kemampuan artikel untuk mengukur efektivitas program serta perubahan yang terjadi di Pantai Hamadi maupun Pantai Holtekamp. Karena itu, hasil kegiatan dibatasi pada aspek yang dapat didukung oleh dokumentasi, sedangkan pengembangan model dan rekomendasi ditempatkan sebagai hasil analisis serta sebagai arah pengembangan program.

3.12 Rencana Tindak Lanjut

Keberlanjutan kegiatan membutuhkan tindak lanjut agar proses edukasi dapat diterjemahkan menjadi aktivitas yang lebih operasional. Tahap awal dapat dilakukan melalui asesmen bersama terhadap kebutuhan masing-masing destinasi. Hasil asesmen kemudian menjadi dasar penyusunan rencana aksi yang memuat prioritas lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan, tata kelola, serta komunikasi destinasi.

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Wisata Berkelanjutan

Tahapan	Rencana Kegiatan	Arah Tindak Lanjut
Edukasi	Penguatan pemahaman mengenai wisata berkelanjutan	Membangun kesamaan perspektif
Asesmen Destinasi	Pemetaan lingkungan, fasilitas, usaha lokal, pelayanan, dan tata kelola	Menentukan kondisi awal dan kebutuhan prioritas
Rencana Aksi Bersama	Penyusunan program berdasarkan hasil asesmen	Menghasilkan kegiatan yang terarah
Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan UMKM, pelayanan, literasi keuangan, dan pemasaran digital	Memperluas kapasitas dan manfaat ekonomi lokal
Pengembangan Jejaring	Koordinasi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, usaha, dan organisasi lingkungan	Memperkuat tata kelola kolaboratif
Pendampingan	Dukungan terhadap implementasi rencana aksi	Menjaga konsistensi pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi	Pengukuran perkembangan menggunakan indikator lingkungan, ekonomi, sosial, dan pelayanan	Menilai capaian dan menentukan perbaikan

Sumber: Dikembangkan oleh tim pengabdian berdasarkan hasil analisis kegiatan dan sintesis literatur, 2025.

Kerangka tindak lanjut tersebut menempatkan kegiatan edukasi sebagai tahap awal dalam siklus pemberdayaan, bukan sebagai kegiatan yang selesai setelah forum berlangsung. Asesmen menjadi penghubung antara pengetahuan dan kondisi aktual destinasi, sedangkan rencana aksi menerjemahkan hasil asesmen ke dalam kegiatan yang dapat dilaksanakan. Pendampingan dan monitoring diperlukan untuk menjaga keberlanjutan serta menghasilkan data yang memungkinkan kontribusi program dievaluasi secara lebih objektif.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program *Sail to Campus* memberikan ruang edukasi untuk membahas pengelolaan wisata berkelanjutan dalam konteks Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp, Jayapura. Pelaksanaan kegiatan mengintegrasikan berbagai perspektif yang mencakup pengelolaan destinasi, ekowisata, *service excellence*, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM lokal, tata kelola kolaboratif, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha pariwisata. Integrasi materi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi pesisir memerlukan pendekatan multidimensional yang menghubungkan perlindungan lingkungan, manfaat ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta kualitas pelayanan.

Secara konseptual, kegiatan ini menempatkan edukasi sebagai tahap awal dalam membangun pemahaman bersama tentang wisata berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan perlu diarahkan pada kemampuan mengelola potensi destinasi dengan tetap menjaga sumber daya pesisir, memperluas keterlibatan masyarakat, membuka ruang bagi pengembangan usaha lokal, serta membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian pendukung untuk memperkuat pengalaman pengunjung, menyebarluaskan informasi, serta meningkatkan citra destinasi.

Evaluasi kegiatan masih terbatas pada dokumentasi proses, sehingga perubahan pengetahuan peserta, implementasi materi, perkembangan usaha masyarakat, kualitas pelayanan, maupun perubahan kondisi Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp belum dapat diukur secara empiris. Keterbatasan data tersebut sejalan dengan dokumentasi awal yang belum menyediakan daftar peserta yang lengkap, *pre-test-post-test*, survei lapangan, maupun pengukuran kondisi destinasi. Hasil kegiatan tidak dimaknai sebagai bukti peningkatan kondisi destinasi, melainkan sebagai fondasi edukatif bagi pengembangan pengelolaan wisata pesisir yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan program memerlukan tindak lanjut melalui asesmen kondisi masing-masing destinasi, pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana aksi bersama, penguatan UMKM dan pelayanan wisata, pengembangan pemasaran digital, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengarahkan kegiatan pengabdian berikutnya dari edukasi menuju aksi, dari aksi menuju pendampingan, serta dari pendampingan menuju pengelolaan destinasi yang terukur dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Yapis Papua, Pemerintah Kota Jayapura melalui perangkat daerah terkait, organisasi dan lembaga yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta seluruh narasumber dan pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan *Sail to Campus*. Apresiasi disampaikan kepada para peserta dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam kegiatan edukasi pengelolaan wisata berkelanjutan. Dukungan berbagai pihak telah memberikan ruang bagi terbangunnya pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan destinasi, ekowisata, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas pelayanan dalam konteks pengembangan wisata pesisir di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Sustainable Tourism Council. (2019). GSTC destination criteria (GSTC-D), version 2.0. Global Sustainable Tourism Council. <https://www.gstc.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0.pdf>
- Hafezi, F., Bijani, M., Gholamrezai, S., Savari, M., & Panzer-Krause, S. (2023). Towards sustainable community-based ecotourism: A qualitative content analysis. *Science of the Total Environment*, 891, 164411. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164411>
- Kadir, A., Hijang, P., Sokoy, F., & Mano, M. B. (2025). Designing creative economy through community-based ecotourism: A case study of Youtefa Bay Park, Jayapura, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 9(2), 155–174. <https://doi.org/10.21580/jsw.2025.9.2.27625>

- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. <https://jdih.kemenparekraf.go.id/peraturan/40>
- Koara, F. P. (2021). The role of community in sustainable tourism: Case study Girsang Simpangan Bolon. *International Journal of Architecture and Urbanism*, 5(1), 58–71. <https://doi.org/10.32734/ijau.v5i1.6032>
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on sustainability in community-based tourism: A bibliometric review and future directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Lara-Morales, O., & Clarke, A. (2024). Sustainable tourism value chain analysis as a tool to evaluate tourism's contribution to the Sustainable Development Goals and local Indigenous communities. *Journal of Ecotourism*, 23(2), 129–147. <https://doi.org/10.1080/14724049.2022.2147189>
- Lasaiba, M. A. (2022). Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat: Sebuah studi literatur. *Jendela Pengetahuan*, 15(2), 85–92. <https://doi.org/10.30598/jp15iss2pp85-92>
- Mohanty, P. P., Patra, S. K., Velankunjuraman, V., & Pathak, D. (2024). Community-based ecotourism in protected areas towards inclusive development: Evidence from Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, India. *International Journal of Business and Society*, 25(2), 810–831. <https://doi.org/10.33736/ijbs.7633.2024>
- Pratama, F. W. N., & Jannah, M. R. (2024). Community-based action plans for coastal area infrastructure enhancement: A strategy for sustainable tourism development. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v9i2.4715>
- Risfandini, A. (2024). Sustainable tourism implementation in Indonesia: Emphasizing green tourism, community-based tourism, and local empowerment. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 11(1), 58–67. <https://doi.org/10.34013/barista.v11i01.1506>
- Sriwijaya, R. R. A., Sutanto, C. L. V., Ramadhani, M. F., & Hafidz, S. A. (2024). Community-based tourism as a socio-economic driver for local communities: Marine ecotourism development strategy on Liki Island, Papua. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 128–140. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v2i1.9555>
- United Nations Environment Program & World Tourism Organization. (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. UNEP & UNWTO. <https://www.unep.org/resources/report/making-tourism-more-sustainable-guide-policy-makers>
- Universitas Yapis Papua, EcoNusa, dan Pemerintah Kota Jayapura. (2024, 14 November). Pengelolaan wisata berkelanjutan di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp Jayapura [Dokumentasi kegiatan *Sail to Campus*].